BNPB

INFOBENCANA

Vol. 6, No. 3 MARET 2025

Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual

HISTORIS 10 TAHUN BANJIR JABODETABEK

Kepala BNPB memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir di Perumahan Villa Jatirasa, Kota Bekasi, Jawa Barat (19/3).

ISSN 2964-9331

9 772964 933007

PUSAT DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN

DAFTAR ISI

BNPB INFO BENCANA

Vol. 6, No. 3 MARET 2024

3 REVIEW BENCANA BULAN MARET 2025 6 HISTORIS BANJIR JABODETABEK 10 TAHUN TERAKHIR 12 BANJIR JABODETABEK MARET 2025 DAN PERAN OPERASI MODIFIKASI CUACA BNPB 18 UPDATE PENANGANAN ERUPSI GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI	23 TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SUKABUMI 26 BANJIR DI KOTA PALANGKARAYA 30 BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA PADANG SIDEMPUNAN 34 BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA MANADO 38 BANJIR DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR 42 PREDIKSI BENCANA APRIL 2025 47 INFOGRAFIS KEJADIAN BENCANA MARET 2025

TIM REDAKSI:

Pimpinan Redaksi	: Abdul Muhari
Redaktur Pelaksana	: Teguh Harjito
Redaktur	: Andri Cipto Utomo Fery Irawan
Editor	: Ainun Rosyida (ain) Ni Made Kesuma Astuti M. Ibrahim Ulinnuha (uln) Ardiyan Rizqi Ananda Pratama Sispa Sagardi Kartika Puji Pangesti Teguh Setiawan Febrianto Kakanur Ichsan (feb)
Editor/Layout Editor	: Budi Assaudi Ratih Ayu Permata (rth) Miftah Aziz Maulani Nofid Yulianto (nfd) Yudhi Firmansyah (yud)
Penerjemah	: Nadya Devina Zharfan
Editor Bahasa	: Rizal Yahya Lutfian P.

ALAMAT REDAKSI:

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BNPB
Graha BNPB-Lantai 12
Jl Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Whatsapp : 0851 5771 7474
Telegram : Data Bencana Indonesia
Web : gis.bnpb.go.id

REVIEW BENCANA BULAN MARET 2025

Bulan ketiga di tahun 2025, bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian bencana yang melanda di wilayah Indonesia, terutama bencana yang termasuk ke dalam hidrometeorologi basah. Kondisi ini dipengaruhi oleh wilayah Indonesia yang masih sering diguyur hujan dengan intensitas curah hujan mulai dari tingkat rendah hingga tingkat sangat tinggi. Dengan tingginya curah hujan yang terjadi

pada beberapa wilayah di Indonesia berimplikasi pada peningkatan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem hingga tanah longsor. Seperti yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), hujan deras dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama pada awal bulan Maret, memicu terjadinya banjir di beberapa titik. Secara kumulatif, selama bulan Maret 2025 tercatat telah terjadi 261 kejadian bencana alam yang melanda wilayah Indonesia. Kejadian bencana yang terjadi didominasi oleh bencana hidrometeorologi dengan persentase mencapai 99,62% dengan banjir masih menjadi kejadian bencana yang paling sering terjadi dengan 189 kejadian atau 72,41% dari total kejadian. Adapun cuaca ekstrem terjadi sebanyak 45 kejadian, tanah longsor 17 kejadian, kebakaran hutan dan lahan delapan kejadian, gelombang pasang dan abrasi satu kejadian dan erupsi gunung api sebanyak satu kejadian. Bencana yang terjadi selama periode bulan Maret 2025, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan bangunan.

STATISTIK BENCANA INDONESIA MARET 2025

Jumlah Kejadian	261
Korban Meninggal (jiwa)	40
Korban Hilang (jiwa)	7
Korban Luka (jiwa)	62
Korban Terdampak & Mengungsi (jiwa)	871.059
Kerusakan Permukiman (unit)	6.503

Gambar 1 Grafik Jumlah Kejadian per Jenis Bencana di bulan Maret 2025.

Sumber : Hasil Pengolahan tim Buletin Info Bencana

Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops BNPB), pada bulan Maret 2025 tercatat 40 orang meninggal, tujuh orang hilang, 62 orang luka-luka dan 871.059 orang terdampak dan mengungsi yang disebabkan oleh kejadian bencana alam. Korban meninggal akibat bencana alam meliputi 15 orang meninggal akibat bencana tanah longsor, 14 orang meninggal akibat bencana banjir, 10 orang meninggal akibat bencana cuaca ekstrem dan satu orang meninggal akibat gempa bumi. Empat orang hilang diakibatkan bencana banjir dan tiga orang akibat bencana tanah longsor. Tingginya jumlah korban meninggal akibat bencana tanah longsor, dikarenakan adanya kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku pada 8 Maret 2025 mengakibatkan tujuh orang meninggal. Bencana tanah longsor di Kabupaten Sukabumi pada 6 Maret 2025, mengakibatkan enam orang meninggal dan tiga orang dinyatakan hilang.

Tabel 1 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Dampaknya di Bulan Maret 2025*

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka-Luka	Mengungsi & Terdampak	Kerusakan								
							Rumah				Satuan Pendidikan	Rumah Ibadat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kantor	Jembatan
							Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam					
							Orang						Unit		
1 GEOLOGI DAN VULKANOLOGI															
	GEMPABUMI	1	1	-	1	-	1	-	12	-	6	-	-	-	-
	ERUPSI GUNUNG API	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TSUNAMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 HIDROMETEROLOGI I															
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KEKERINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 HIDROMETEROLOGI II															
	BANJIR	189	14	4	13	853.341	477	890	792	185.961	7	22	1	-	29
	GELOMBANG PASANG & ABRASI	1	-	-	-	147	37	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANAH LONGSOR	17	15	3	17	10.032	478	607	1.778	-	7	8	-	-	14
	CUACA EKSTREM	45	10	-	31	7.539	167	269	995	-	10	6	2	-	-
	TOTAL	261	40	7	62	871.059	1.160	1.766	3.577	185.961	30	36	3	-	43

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

*Data per 5 April 2025

Selain menelan korban jiwa, bencana yang terjadi pada bulan Maret juga berdampak pada pemukiman warga dan fasilitas umum seperti satuan pendidikan, rumah ibadat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sebanyak 6.503 unit rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat bencana dengan rincian 1.160 unit rumah mengalami rusak berat, 1.766 unit rumah rusak sedang dan 3.577 unit rumah mengalami rusak ringan. Kerusakan rumah paling banyak disebabkan oleh bencana tanah longsor dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan mencapai 2.863 unit. Selain itu, banjir yang terjadi di bulan Maret mengakibatkan sedikitnya 185.961 unit rumah terendam. Adapun fasilitas umum yang rusak akibat bencana diantaranya 30 unit satuan pendidikan, 36 unit rumah ibadat, 43 unit jembatan dan tiga unit fasilitas pelayanan kesehatan.

Gambar 2 Grafik Jumlah Kejadian Bencana per Provinsi di bulan Maret 2025.

Sumber : Hasil Pengolahan tim Buletin Info Bencana

Pada bulan Maret tahun 2025, sebagian besar provinsi di Indonesia didominasi kejadian bencana banjir. Hanya sedikit provinsi yang didominasi kejadian bencana selain banjir, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Bangka. Ketiga provinsi tersebut didominasi bencana cuaca ekstrem. Adapun Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara hanya mencatatkan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kejadian berimbang antara bencana banjir dan cuaca ekstrem. Sepanjang periode bulan Maret tahun ini, lima provinsi dengan jumlah kejadian bencana alam terbanyak yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau dan Sulawesi Tengah. Provinsi Jawa Barat mengalami 37 kejadian bencana meliputi banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur mengalami kejadian bencana sebanyak 30 kejadian meliputi banjir dan cuaca ekstrem. Untuk provinsi Jawa Tengah mengalami 26 kejadian bencana meliputi banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Provinsi Riau mengalami 22 kejadian bencana meliputi banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Adapun provinsi Sulawesi Tengah mengalami 17 kejadian bencana meliputi banjir dan gelombang pasang/abrasi.

Gambar 3 Perbandingan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana di bulan Maret 2024 dan 2025.

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Perbandingan jumlah kejadian bencana dan dampaknya pada bulan Maret di tahun 2024 dan 2025, menunjukkan terjadi penurunan baik pada aspek jumlah kejadian bencana maupun dampaknya. Korban meninggal dan hilang mengalami penurunan sebesar 45,98%. Hal ini berdasarkan data pada Gambar 3 yang menjelaskan bahwa pada tahun 2024 terdapat 87 orang meninggal dan hilang akibat bencana sedangkan pada tahun 2025 terdapat 47 orang meninggal dan hilang. Korban luka-luka mengalami penurunan sebesar 15,07%, turun dari 73 orang di tahun 2024 menjadi 62 orang di tahun 2025. Korban terdampak dan mengungsi di tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2025. Penurunan yang terjadi sebesar 37,89%, sesuai data di tahun 2024 tercatat 1.402.513 orang terdampak dan mengungsi akibat bencana sedangkan di tahun 2025 menjadi 871.059 orang. Adapun kerusakan rumah akibat bencana mengalami penurunan, turun sebesar 66,36% dari 19.329 unit rumah di tahun 2024 menjadi 6.503 unit rumah di tahun 2025. Frekuensi kejadian bencana mengalami penurunan sebesar 23,91% yaitu turun dari 343 kejadian bencana di tahun 2024 menjadi 261 kejadian di tahun 2025

Gambar 4 Grafik Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana di bulan Maret 2024 dan 2025.

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Penurunan total kejadian bencana pada bulan Maret tahun 2024 dibandingkan bulan Maret tahun ini, tidak sejalan dengan penurunan jumlah kejadian untuk semua jenis bencana. Bencana cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang pasang dan abrasi mengalami penurunan jumlah kejadian dibandingkan bulan Maret tahun lalu, sedangkan bencana gempa bumi memiliki jumlah kejadian yang sama baik tahun ini maupun tahun lalu. Adapun banjir menjadi satu-satunya bencana yang mengalami kenaikan jumlah kejadian. Bencana banjir mengalami kenaikan dari 171 kejadian di tahun 2024 menjadi 189 kejadian di periode yang sama pada tahun ini. Selain itu, banjir masih menjadi kejadian bencana paling dominan yang melanda wilayah Indonesia pada bulan Maret. Jenis bencana yang mengalami penurunan kejadian dengan angka penurunan cukup signifikan yaitu kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan turun signifikan. Hal ini sesuai dengan data pada Gambar 4, pada tahun 2024 terdapat 77 kejadian sedangkan pada tahun 2025 hanya terdapat delapan kejadian bencana. (yud).

HISTORIS BANJIR JABODETABEK 10 TAHUN TERAKHIR

Faktor penyebab banjir di daerah perkotaan seperti wilayah Jabodetabek disebabkan antara lain karena curah hujan yang tidak terserap dengan meningkatnya aliran air dan turunnya kapasitas penyerapan tanah. Selain itu, dapat juga disebabkan karena saluran air yang tidak memadai, karena kapasitas drainase dan sungai tidak mencukupi untuk menampung debit air, serta permukaan tanah lebih rendah dari laut.

Gambar 5 Kepala BNPB bersama Bupati Bogor, dan Danrem 061/Suryakencana meninjau perkembangan Jembatan Bailey yang menghubungkan Desa Leuwimalang dan Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarura, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (12/3). Sumber : Hasil Dokumentasi Tim Pusdatinkom

Sejak minggu malam, 2 Maret 2025 hujan terus mengguyur wilayah Jabodetabek dan mengakibatkan banjir di beberapa titik, di antaranya Banjir Bandang di Kabupaten Bogor (02/03). Banjir berdampak pada 27 desa di 14 kecamatan. Jalan dan jembatan penghubung antar desa di beberapa titik turut roboh akibat hantaman arus sungai yang deras disertai dengan berbagai material yang turut mengiringi air yang mengalir. Satu orang meninggal dunia, 29.551 orang menderita-mengungsi dan 131 rumah rusak. Hasil asesmen bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan bahwa 428 rumah harus direlokasi di Desa Bojong Koneng.

Selain itu, terdapat tujuh jembatan putus dan harus segera diperbaiki, berbagi tugas dengan Bupati Bogor, pemerintah pusat melalui BNPB telah memperbaiki dua jembatan. Dalam satu minggu, pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan Desa Leuwimalang dan Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua sudah selesai 100% dan di Desa Tugu Utara sudah 60%. Saat ini kondisi sudah kondusif, banjir sudah surut dan jembatan dapat dilalui.

Gambar 6 Kepala BNPB mengecek langsung pembangunan Jembatan Bailey di Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat (12/3). Sumber: Hasil Dokumentasi Tim Pusdatinkom

Banjir di Kota Bekasi (3/3), dipicu hujan intensitas tinggi di 29 kelurahan di 8 (delapan) kecamatan menyebabkan banjir yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia dan 83.819 orang menderita/mengungsi. Dukungan darurat BNPB antara lain menyalurkan bantuan logistik dan peralatan senilai Rp. 1.468.640.000,-; melakukan pembersihan lumpur di kawasan terdampak sembari menunggu pengajuan Kota Bekasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, serta melakukan Operasi Modifikasi Cuaca yang dilaksanakan pada 15 Maret 2025. Kondisi sudah kondusif dan banjir sudah surut sejak 9 Maret 2025.

Selain banjir di Kota Bekasi, banjir juga terjadi di Kabupaten Bekasi (4/03) disebabkan karena hujan dengan intensitas tinggi pada 57 desa di 19 kecamatan, menyebabkan 92.492 orang menderita/mengungsi. BNPB menyalurkan bantuan logistik dan peralatan senilai Rp. 585.059.000,-, membantu pembersihan lumpur di kawasan terdampak, menunggu pengajuan Kabupaten Bekasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi, melakukan Operasi Modifikasi Cuaca 15 Maret 2025. Banjir sudah surut sejak 19 Maret 2025 dan keadaan kondusif.

Banjir di Kabupaten Tangerang berdampak pada 3.429 KK/8.111 jiwa pada 21 Desa dan 1 (satu) kelurahan

di 14 kecamatan. BNPB memberikan bantuan logistik dan peralatan 250 paket sembako, 250 makanan siap saji, 200 lembar selimut dan 200 matras.

Banjir di Kota Tangerang berdampak pada warga sebanyak 2.489 KK/7.317 Jiwa di 24 Titik, 16 kelurahan di tujuh kecamatan. Dukungan darurat yang dilakukan antara lain pemantauan tinggi muka air (TMA) Sungai Cisadane, bersama Pemerintah Daerah (Pemda) juga membuka layanan hotline 24 jam untuk menangani pengaduan dari masyarakat.

Banjir di Kota Tangerang Selatan, terdapat 13 titik banjir yang berdampak pada ±560 KK. Pada bencana ini, Pemerintah Kota tidak menetapkan Status Tanggap Darurat.

Banjir di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berdampak di 62 RT di 17 Kelurahan dan satu jiwa meninggal dunia. Dukungan darurat BNPB berupa bantuan logistik peralatan yang telah diberikan senilai Rp. 860.092.000. Kondisi kondusif dan banjir sudah surut sejak 19 Maret 2025.

Banjir di Depok berdampak pada 1.928 KK di 36 kelurahan dan empat jiwa luka-luka. Dukungan darurat berupa bantuan logistik peralatan senilai Rp. 574.204.320,- . Kondisi kondusif dan banjir sudah surut sejak 18 Maret 2025

Jika menilik 10 tahun terakhir (2015—2024), Jabodetabek juga pernah mengalami banjir besar, di antaranya sebagai berikut.:

1. Pada 9 Februari 2015, wilayah terdampak adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi. Total korban sebanyak 76.074 jiwa menderita dan 19.841 jiwa mengungsi.
2. Pada 4—5 Februari 2018, wilayah terdampak adalah Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Selatan. Total korban sebanyak 18.542 jiwa menderita dan 13.230 jiwa mengungsi.
3. Pada 1 Januari 2020 terjadi banjir akibat curah hujan mencapai 377 mm, wilayah Terdampak di seluruh Jabodetabek. Total korban jiwa sebanyak 39 orang meninggal, 142.755 jiwa menderita dan 411.124 jiwa mengungsi.
4. Pada 19 Februari 2021, wilayah terdampak di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Timur. Total korban sebanyak 158.457 jiwa menderita dan 1.224 jiwa mengungsi.

Tabel 2 Prakiraan Curah Hujan di Wilayah Jabodetabek

Waktu	4-5 Februari 2018	1 JANUARI 2020
Intensitas Curah Hujan	Tinggi - Sangat Tinggi dengan rata-rata curah hujan 400-500 mm/hari.	Intensitas CH di Jabodetabek: Tinggi - Sangat Tinggi
Prakiraan	Wilayah DKI Jakarta menjadi daerah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibandingkan wilayah yang lainnya.	Berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah Jabodetabek tidak berpotensi terjadi banjir (tingkat potensi rendah)
Titik lokasi terdampak	54 kecamatan terdampak Jakarta : 18 kecamatan Bogor : 14 kecamatan Kota Bogor : 10 kecamatan Bekasi : 6 kecamatan Kota Bekasi : 6 kecamatan	90 kecamatan terdampak Jakarta : 22 kecamatan Bogor : 15 kecamatan Depok : 4 kecamatan Tangerang: 24 kecamatan Bekasi : 25 kecamatan

BANJIR DI JABODETABEK		
Waktu	19 FEBRUARI 2021	3-4 MARET 2025
Intensitas Curah Hujan	Intensitas CH di Jabodetabek: Tinggi - Sangat Tinggi	Prakiraan CH di Jabodetabek: Menengah - Tinggi
Prakiraan	Berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat potensi rendah: Depok, Tangerang dan Bogor - Tingkat potensi rendah - menengah: Bekasi dan Jakarta 	Berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat potensi rendah: Tangerang dan Bogor - Tingkat potensi menengah : Depok, Bekasi dan Jakarta
Titik lokasi terdampak	34 kecamatan terdampak Jakarta : 13 kecamatan Bogor : 3 kecamatan Bekasi : 18 kecamatan Depok : - Tangerang: -	76 kecamatan terdampak Jakarta : 13 kecamatan Bogor : 2 kecamatan Depok : 8 kecamatan Tangerang: 26 kecamatan Bekasi : 27 kecamatan

Sumber : BMKG

Berdasarkan data bencana banjir 10 tahun terakhir yang tertera pada Tabel 2 & 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, 2020, 2021 dan 2025, wilayah Jabodetabek mengalami intensitas curah hujan menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 4—5 Februari 2018 menunjukkan bahwa wilayah yang berdampak curah hujan tinggi dan titik terdampak banjir sebanyak 18 kecamatan dari 54 titik kecamatan terdampak di DKI Jakarta. Pada 1 Januari 2020, prakiraan BMKG wilayah Jabodetabek potensinya rendah untuk terjadi banjir. Kenyataannya di lapangan tertinggi (10 tahun terakhir) titik lokasi terdampaknya mencapai 90 kecamatan.

Pada 19 Februari 2021, prakiraan BMKG rendah sampai menengah untuk potensi banjir di Jabodetabek dan ada 34 kecamatan terdampak. Pada 3—4 Maret 2025, prakiraan BMKG tingkat potensi banjir rendah sampai menengah dan ada 76 titik kecamatan terdampak di Jabodetabek.

Asumsi banjir lima tahunan yang terjadi di Jabodetabek tidak sesuai dengan fakta banjir yang terjadi di tahun 2020 dan 2025. Jika merujuk data BMKG untuk curah hujan di tahun 2020 menunjukkan tingkat curah hujan yang sangat ekstrem di atas 150 mm/hari di bagian Timur Jakarta. Pada saat itu kawasan Halim juga terendam, banjir tahun 2020 dominan disebabkan oleh hujan lokal. Curah hujan tertinggi terukur mencapai 377mm/hari. Banjir pada saat itu, bukan banjir kiriman, karena wilayah Halim bukan bagian dari alur sungai tertentu yang bisa membuat Halim terendam atau luapan dari anak sungai.

Gambar 7 Peta Perbandingan Sebaran Hujan di Jabodetabek pada Tahun 2020 dan 2025.

Sumber : BMKG

Jika dibandingkan banjir di tahun 2025, faktor dominan penyebab terjadinya bencana banjir karena banjir kiriman. Pada 4 Maret 2025 dini hari menunjukkan status siaga 1 di pintu air Katulampa. Hal ini akibat dari curah hujan di Katulampa yang mencapai 232 mm/hari, dalam waktu empat sampai enam jam, air/banjir kiriman sampai ke hilir daerah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya..

Gambar 8 Grafik Jumlah Kejadian dan Dampak Banjir 10 Tahun Terakhir di Jabodetabek.

Sumber : Hasil Pengolahan Tim Buletin Info Bencana

Data BNPB menunjukkan dalam 10 tahun terakhir, wilayah Jabodetabek mengalami korban jiwa dan kerusakan bangunan tertinggi pada tahun 2020. Tercatat 93 kejadian bencana banjir yang cukup masif dan berdampak di 90 kecamatan wilayah Jabodetabek, menyebabkan lima korban luka/sakit, 75 orang meninggal dan hilang, serta 7.555 bangunan rusak.

Kejadian bencana banjir tertinggi pada tahun 2021 dengan 99 kejadian bencana banjir, 17 korban meninggal dan hilang serta 269 korban luka/sakit. Tahun 2022 jumlah bencana menurun menjadi 84 kejadian banjir namun korban meninggal dan hilang meningkat menjadi 22 jiwa serta 16 jiwa korban luka/sakit.

Upaya BNPB dalam penanganan banjir Jabodetabek, berkoordinasi aktif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal, proses evakuasi berjalan dengan lancar dan memastikan setiap warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak. Mengerahkan sejumlah personil, peralatan dan bantuan makanan serta non-makanan kepada BPBD yang wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Selain itu, BNPB juga memberikan pendampingan bencana banjir Jabodetabek di tahun 2025.

Pemantauan dan Pendampingan Bencana Banjir Jabodetabek

Gambar 9 Pembagian Tugas Personil BNPB untuk melakukan Pemantauan dan Pendampingan Banjir di Wilayah Jabodetabek. Sumber:BNPB

Banjir yang melanda Jabodetabek menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan masyarakat di daerah terdampak. Total kerusakan dan kerugian Rp. 1.699.670.076.814,- dengan rincian:

1. Total Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan	Rp.	1.344.732.352.500,-
2. Total Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur	Rp.	155.997.582.000,-
3. Total Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi	Rp.	144.463.511.000,-
4. Total Kerugian Sektor Sosial	Rp.	36.786.198.314,-
5. Total Kerugian Lintas Sektor	Rp.	352.452.000,-

Rekapitulasi nilai kerusakan dan kerugian di wilayah terdampak:

1. Kota Bekasi	Rp.	878.625.482.314,-
2. Kabupaten Bekasi	Rp.	680.097.511.000,-
3. Kabupaten Bogor	Rp.	96.782.500.000,-
4. Kota Depok	Rp.	28.813.550.000,-
5. Kota Bogor	Rp.	8.358.750.000,-
6. DKI Jakarta	Rp.	1.927.731.000,-

Jangka menengah dan panjang untuk penanganan banjir, BNPB bersama Kementerian/Lembaga terkait antara lain akan melakukan sinkronisasi kegiatan mitigasi bencana, pelatihan dan peningkatan SDM PB, edukasi serta sosialisasi kesiapsiagaan bencana, pengembangan sponge city, penyelesaian drainase jaringan bawah tanah Jabodetabek untuk mengoptimalkan sistem pengendalian banjir.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan “Untuk jangka pendek, menengah dan panjang kami sudah susun salah satunya adalah peningkatan sistem peringatan dini BNPB bersama kementerian/lembaga terkait membangun sistem peringatan dini berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI) dan kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas. Selain itu, kami juga mendorong untuk optimalisasi pooling fund bencana guna memperkuat pendanaan penanganan bencana yang selama ini pakai Dana Siap Pakai (DSP)” ucapnya.

Gambar 10 Kepala BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar di Lantai 14 Gedung Kemenko PMK, pada Kamis (27/3) di Jakarta.

Sumber : Hasil Dokumentasi Tim Pusdatinkom

BNPB mendukung pembentukan tim khusus mitigasi bencana yang bertugas merumuskan strategi konkret dalam menghadapi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. BNPB juga terus melakukan pemantauan serta evaluasi untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Sinergi antara BNPB, kementerian terkait, dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mitigasi banjir. (acu).

BANJIR JABODETABEK MARET 2025 DAN PERAN OPERASI MODIFIKASI CUACA BNPB

Wilayah Jabodetabek memiliki riwayat panjang dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Pada Maret 2025, kawasan ini kembali diuji dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir signifikan di beberapa wilayah. Sebagai respons taktis dan strategis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimplementasikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan tujuan ganda: mereduksi potensi dan intensitas hujan penyebab banjir di Jabodetabek serta mengamankan kelancaran arus mudik Lebaran di Jawa Barat.

Banjir yang melanda Jabodetabek pada Maret 2025 menjadi pengingat akan kerentanan wilayah metropolitan terhadap kondisi cuaca ekstrem. Curah hujan yang tinggi, diperparah dengan faktor drainase yang kurang optimal dan kiriman air dari wilayah hulu, menyebabkan genangan air yang melumpuhkan aktivitas masyarakat di berbagai lokasi. Dampak banjir tidak hanya terbatas pada kerugian materiel, tetapi juga mengganggu mobilitas, kesehatan, dan aktivitas sosial ekonomi warga.

Data dan informasi yang dihimpun selama bulan Maret menunjukkan bahwa sebanyak 72.050 unit rumah terendam banjir di wilayah Jabodetabek. Kondisi ini mengakibatkan 259.883 jiwa menderita dan

terpaksa mengungsi. Angka ini menegaskan dampak signifikan banjir di berbagai wilayah Jabodetabek, dengan fokus utama penanganan awal yaitu evakuasi warga, pendirian posko pengungsian, dan penyaluran bantuan. Pemerintah pusat dan daerah berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan memulihkan kondisi pasca-banjir.

Gambar 11 Peta Kejadian Banjir Jabodetabek dan Karawang. Sumber: BNPB

Gambar 12 Banjir di Daerah Jatiasih, Kota Bekasi Pada 4 Maret 2025
Sumber : Pesawat NIR Awak Tim Pusdatinkomben

BNPB memberikan bantuan logistik, peralatan, dan dana operasional kepada wilayah-wilayah terdampak banjir di Jabodetabek pada awal Maret 2025, meliputi:

1. Kota Bekasi (3 April):

- 3 unit Perahu Karet
- 3 unit Perahu Polyethylene
- 500 pcs Makanan siap saji
- 500 Paket Sembako
- 250 pcs Matras
- 750 pcs Selimut
- 750 pcs Kasur Lipat
- 100 paket Hygiene Kit
- Rp 200.000.000 Dana Operasional DSP
- 100 dus Air Mineral
- 1.000 butir Telur
- 50 liter Minyak Goreng
- 2 tenda pengungsi
- 1 unit Mobil toilet 2 bilik
- 1 unit Truk Trailer toilet 4 bilik
- 4 bilik Toilet gedung logistik
- Dukungan dapur umum untuk makanan 3 kali sehari (500 bungkus untuk pengungsi di kantor logistik sebanyak 200 pax dan di perumahan PGP sebanyak 300 pax).

2. Kabupaten Bekasi (4 April):

- 500 Paket Sembako
- 500 Paket Makanan siap saji
- 3 unit Tenda Pengungsi
- Rp 200.000.000 Dana Operasional DSP

3. Kabupaten Bogor:

- Rp 200.000.000 Dana Operasional
- 200 paket Sembako
- 150 pouch Makanan siap saji
- 100 Paket Hygiene kit
- 2 unit Jembatan Bailey (senilai Rp 300.000.000)

4. Kota Depok (3 April):

- 2 Unit Perahu Karet
- 8 Unit Dayung
- 16 Unit Pelampung
- 16 Buah Sepatu Boat
- 2 unit Pompa Perahu
- 2 Unit Portable Apung
- 5.000 Pcs Karung

Gambar 13 Kepala BNPB Memberikan Bantuan Kepada Para Pengungsi Akibat Banjir Jabodetabek.
Sumber : Hasil Dokumentasi Tim Pusdatinkom

Gambar 14 Tenda BNPB Berdiri Untuk Menampung Para Pengungsi di Gudang Jatiasih BNPB, Bekasi.
Sumber : Hasil Dokumentasi Tim Pusdatinkom

Menyadari potensi ancaman hidrometeorologi, BNPB mengambil langkah proaktif melalui implementasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi ini dilakukan dalam beberapa tahap dengan fokus dan tujuan yang berbeda, namun saling terkait dalam upaya perlindungan masyarakat.

Gambar 15 Posko OMC di Landasan Udara Halim Perdanakusuma. Sumber: BNPB

Gambar 16 Proses Pemuatan Bahan Semai NaCl Untuk OMC Ke Pesawat Dengan Nomor Registrasi PK-SNP. Sumber: BNPB

Pada fase awal Mitigasi Banjir Jabodetabek (4—8 Maret 2025), OMC difokuskan untuk mengurangi potensi dan intensitas hujan di wilayah Jabodetabek yang telah terdampak banjir. Dengan menggunakan pesawat Cessna Caravan 208B, BNPB melakukan penyemaian Natrium Klorida (NaCl) di lapisan atmosfer yang tepat. Harapannya, proses ini dapat memicu hujan di area yang lebih aman atau mengurangi volume hujan yang jatuh di Jabodetabek. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., menegaskan bahwa operasi ini merupakan respons terhadap prediksi curah hujan tinggi yang masih berlanjut. Hasil sementara menunjukkan efektivitas operasi, dengan hasil wilayah Jabodetabek terpantau. tidak mengalami hujan setelah penyemaian dilakukan pada hari kedua pelaksanaan.

Gambar 17 OMC malam hari juga dilakukan untuk mengurangi curah hujan. Sumber : BNPB

Tahap Lanjutan BNPB melakukan sinergi dengan TNI Angkatan Udara (AU), BMKG, BPBD Provinsi DKI Jakarta, BPBD Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi curah hujan dan antisipasi banjir meluas. Melihat potensi curah hujan yang masih tinggi hingga pertengahan Maret, BNPB memperluas OMC pada 11—20 Maret 2025. Operasi gabungan ini menggunakan tiga pesawat dari dua landasan udara, yakni Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung. Tujuannya adalah mengantisipasi potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jabodetabek dan Banten, serta mempercepat proses pemulihan darurat. Fokus operasi dibagi antara penyemaian siang hari oleh tim BPBD di wilayah perairan dan utara, serta penerbangan malam hari oleh tim BNPB di wilayah barat Jakarta-Selat Sunda untuk mengurangi suplai massa udara penyebab hujan. Hasil awal menunjukkan penurunan intensitas hujan di Jabodetabek. Update per 20 Maret 2025, upaya tindak lanjut BNPB dan BPBD dalam melakukan penanganan pasca banjir Jabodetabek dengan menggunakan OMC sejak tanggal 4—20 Maret 2025, secara total sudah melakukan 111 sortie penerbangan, dengan 100 ton bahan disemai dan durasi terbang selama 198 jam 43 menit.

Gambar 18 Jadwal Pelaksanaan Modifikasi Cuaca di Jabodetabek dan Jabar. Sumber: BNPB

Meskipun dalam masa pelaksanaan modifikasi cuaca beberapa wilayah Jabodetabek tetap diguyur hujan, namun potensi risiko dampak bencana dapat dikurangi. BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat, kejadian bencana di Provinsi Jawa Barat mencapai 60 kejadian dalam periode OMC. Jumlah ini memang meningkat dibandingkan pada periode sebelum OMC. Meskipun demikian, potensi risiko bencananya menurun signifikan.

Sebagai perbandingan, jumlah jiwa terdampak pada masa sebelum OMC sebanyak 231.180 jiwa, dibandingkan dengan data pada OMC hari ke-10 terdata 15.582 jiwa. Persentase penurunan jiwa terdampak sebesar 92,3%. Risiko korban meninggal dunia juga berkurang 100% setelah dilaksanakannya OMC. Sebelumnya, banjir dan longsor di wilayah Jawa Barat menewaskan sebanyak 10 orang. Pasca OMC, tidak ada korban meninggal dunia meskipun wilayah Jawa Barat sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada 17—18 Maret 2025 lalu.

Demikian juga dengan jumlah kerugian materiel yang mampu dikurangi dengan adanya operasi modifikasi cuaca. BPBD Provinsi DKI Jakarta juga mencatat penurunan dampak bencana dari sebanyak 10.626 jiwa terdampak pada dasarian pertama Maret 2025 menjadi 721 jiwa terdampak pada dasarian kedua Maret 2025 walaupun jumlah kejadian bencana karena cuaca ekstrem meningkat 57%.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, prospek cuaca pada dasarian ketiga Maret 2025 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat terpantau potensi hujan ringan hingga sedang.

Banjir Jabodetabek Maret 2025 menjadi ujian bagi ketahanan wilayah metropolitan terhadap bencana hidrometeorologi. Respons cepat dan strategis dari BNPB menunjukkan upaya proaktif pemerintah dalam melindungi masyarakat, dengan adaptasi fokus operasi dari mitigasi banjir. OMC menjadi instrumen penting dalam kerangka penanggulangan bencana yang komprehensif. Keberhasilan jangka panjang upaya ini akan sangat bergantung pada sinergi yang berkelanjutan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi risiko bencana di masa mendatang (fbr).

UPDATE PENANGANAN ERUPSI GUNUNG LEWOTOBİ LAKI-LAKI

Erupsi besar Gunung Lewotobi Laki-laki kembali terjadi di malam hari. Erupsi berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 22.56 WITA, dengan tinggi kolom abu yang teramati mencapai 8.000 meter di atas puncak (sekitar 9.584 meter di atas permukaan laut). Kolom abu yang terlihat berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal yang mengarah ke barat daya dan barat. Erupsi ini terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 47,6 mm dan durasi 669 detik.

Sekitar satu jam kemudian, pada hari Jumat, 21 Maret 2025, pukul 00:10 WITA, erupsi kembali terjadi dengan tinggi kolom abu yang teramati sekitar 2.500 meter di atas puncak (sekitar 4.084 meter di atas permukaan laut). Kolom abu yang terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat. Erupsi ini terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi 64 detik.

Sejak awal Maret, hasil pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan adanya sedikit peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki. Pengamatan visual pada periode 8—15 Maret 2025 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik di Gunung Lewotobi Laki-laki, dengan rata-rata ketinggian kolom erupsinya antara 700 hingga 2.500 meter. Pada 15 Maret 2025, tercatat lima kali erupsi antara pukul 00.00 hingga 12.00 WITA. Peningkatan ini terkait dengan akumulasi gempa vulkanik dalam yang terjadi pada 13 Maret 2025, yang sebelumnya rata-rata satu sampai dua kejadian per hari, namun pada tanggal tersebut meningkat menjadi enam kejadian.

Gambar 19 Erupsi Gunung Lewotobi Pada 20 Maret (Kanan) dan 21 Maret (Kiri) Tampak Dari Pos Pengamatan Gunung Api. Sumber : PVMBG

Berdasarkan peningkatan aktivitas yang terjadi, pada Kamis, 20 Maret 2025, PVMBG mengeluarkan informasi siaran pers Nomor 43/KM.5/BGL/2025 yang menyatakan kenaikan status Gunung Lewotobi Laki-laki dari level III (SIAGA) menjadi level IV (AWAS), pada pukul 22.30 WITA. Menindaklanjuti informasi peningkatan status Gunung Lewotobi Laki-laki, BPBD mengeluarkan surat pernyataan bencana alam Nomor BPBD.300.2/48.4/Bid.KL/II/2025 yang menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan status Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki dari Level III (Siaga) ke Level IV (Awas) pukul 03:00 WITA. Kenaikan status ini diikuti dengan erupsi besar yang terjadi selang beberapa menit setelah peningkatan status gunungapi. Beberapa rekomendasi PVMBG terkait kenaikan status gunung api menjadi Level IV (AWAS), sebagai berikut :

1. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius tujuh dan delapan kilometer sektoral barat daya dan timur laut dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
2. Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.
3. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki mewaspadaai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawokote.
4. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-laki diharuskan memakai masker/penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan.
5. Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau PVMBG, Badan Geologi di Bandung.
6. PVMBG akan selalu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Satlak PB setempat dalam memberikan informasi tentang kegiatan Gunung Lewotobi Laki-laki.

Erupsi besar yang terjadi pada 20 Maret 2025, mengakibatkan dua korban jiwa mengalami luka bakar. Korban terluka saat evakuasi dari radius lima kilometer dari puncak Gunung Lewotobi Laki-laki. Satu korban dirawat di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan satu korban lainnya dirawat di Puskesmas Lewolaga. Selain korban luka, erupsi juga merusak lahan perkebunan yang ada di kaki gunung. Erupsi berdampak pada enam desa di dua kecamatan. Wilayah terdampak meliputi Desa Nawokote, Desa Boru, Desa Hokeng Jaya dan Desa Klatanlo di Kecamatan Wulanggitang. Dua desa lainnya meliputi Desa Dulipali dan Desa Nobo di Kecamatan Ile Bura.

Gambar 20 Zona Rekomendasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Lewotobi Pada Tingkat Aktivitas Level IV (Awat). Sumber : PVMBG

Pemerintah terus melanjutkan upaya penanganan terhadap para pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki sejak November 2024. Pada hari Jumat, 21 Maret 2025, dilaksanakan rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno, M. Soc. Sc., bertempat di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Rapat membahas Perkembangan Penanganan Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-Laki meliputi lahan (yang akan ditempati), pembangunan huntap, penyelesaian akses jalan ke huntap dan juga pembangunan infrastruktur lain.

Gambar 21 (a) dan (b) Suasana Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Membahas Perkembangan Penanganan Pengungsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Sumber : Hasil Dokumentasi Tim Pusatatinkom

Pendampingan pengungsi di lapangan masih terus berjalan demi tercukupinya kebutuhan dan kenyamanan penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Pemerintah bersatu padu dalam pemenuhan kebutuhan seperti masih beroperasinya dapur umum, pendistribusian logistik dan air bersih, serta dukungan psikososial. Selain itu, juga dilakukan percepatan dalam pembangunan Hunian Sementara (Huntara), Hunian Tetap (Huntap) dan pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Setelah sepuluh hari aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami penurunan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh dari pemantauan visual dan instrumental, maka PVMBG mengeluarkan siaran pers Nomor 55/KM.05/BGL/2025 yang menyatakan bahwa tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki diturunkan dari Level IV (AWAS) menjadi Level III (SIAGA) terhitung tanggal 30 Maret 2025 pukul 12.00 WITA. Meskipun aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami kenaikan pada bulan ini, jumlah pengungsi cenderung menurun selama periode Maret 2025. Pada awal maret jumlah pengungsi sebanyak 1.409 KK dengan total jiwa sebanyak 5.070 jiwa. Sesaat setelah kenaikan status gunung api menjadi level IV (AWAS), jumlah pengungsi turun menjadi 1.350 KK dengan total jiwa sebanyak 4.796 jiwa. Setelah penurunan status gunung api menjadi level III (SIAGA), jumlah pengungsi pada akhir Maret 2025 sejumlah 1.217 KK dengan total jiwa sebanyak 4.298 jiwa.

Gambar 22 Data Pengungsi Erupsi Lewotobi Laki-laki. Sumber : BPBD Flores Timur

Selama periode Maret 2025, sebagian besar masyarakat sudah menempati huntara yang dibangun oleh pemerintah bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Pembangunan Huntara Lokasi I, yang terdiri dari 50 unit kopel (250 unit), telah selesai dan kini telah dihuni oleh 250 Kepala Rumah Tangga (KRT). Dari total penghuni tersebut, 118 KRT berasal dari Desa Dulipali yang sebelumnya pindah dari Pos Lapangan ke Huntara Lokasi I. Sementara itu, 132 KRT lainnya berasal dari Desa Klantanlo yang juga telah pindah dari Pos Lapangan. Selain itu, bantuan instalasi air bersih dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah terpasang untuk 50 kopel, yang mencakup seluruh 250 kepala rumah tangga.

Pembangunan Huntara Lokasi II, yang terdiri dari 40 kopel (200 unit), telah selesai 100% dengan total 200 unit yang diperuntukkan bagi 200 KRT. Jaringan instalasi air bersih yang dikerjakan oleh BBWS di Lokasi Huntara II juga telah selesai 100%, dengan pemasangan 20 unit tandon air yang mencukupi kebutuhan

seluruh unit huntera. Instalasi listrik dari PLN untuk Lokasi Huntera II telah terpasang pada 14 kopel (14 unit KWh meter), dan pemasangan untuk 26 kopel lainnya masih akan dilakukan dengan PLN. Saat ini, Lokasi Huntera II sudah dihuni oleh pengungsi dari Desa Boru, dengan tujuh kopel (35 KRT) telah menempati unit tersebut.

Gambar 23 (a) dan (b) Progres Huntera Penyintas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Sumber: BNPB

Bantuan sumur bor dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Badan Geologi telah siap digunakan. Namun, terdapat beberapa kendala yang harus diselesaikan, antara lain daya listrik untuk sumur bor KSAD perlu ditambah dari 1.300 watt menjadi 2.200 watt. Sementara itu, daya listrik untuk sumur bor Badan Geologi harus ditingkatkan dari 550 watt menjadi 1.300 watt. Surat permohonan untuk penambahan daya listrik tersebut masih dalam proses oleh pihak BPBD Kabupaten Flores Timur. Selain itu, surat keputusan perubahan untuk penerima manfaat dana tunggu hunian dan surat keputusan perubahan penerima manfaat untuk hunian sementara juga masih dalam proses di Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Selain pembangunan huntera, BNPB juga menyalurkan DTH kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp. 2.300.400.000,-. Jumlah penerima manfaat sebanyak 639 KK dengan rincian penerima DTH meliputi Desa Nobo (52 KK), Desa Dulipali (60 KK), Desa Klatanlo (157 KK), Desa Hokeng Jaya (109 KK), Desa Nawokote (80 KK) dan Desa Boru (181 KK). Setiap KK mendapatkan dana tunggu hunian per bulan Rp. 600.000,- selama enam bulan dengan total Rp. 3.600.000,-.

Gambar 24 Denah Lokasi Huntera Pasca Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Sumber : BPBD Flores Timur

Sementara itu, pembangunan huntap juga segera dilakukan percepatan pembangunan untuk masyarakat yang akan direlokasi. Jumlah masyarakat yang direlokasi berjumlah 2.209 KK dengan estimasi daya tampung sekitar 40—50 kepala keluarga per hektar. Lokasi relokasi memiliki total luas 51,2 hektar yang terbagi di empat lokasi yaitu Noboletto (12,7 ha), Waidoko (7,5 ha), Bungawolo (11 ha) dan Wukoh Lewoloroh (20 ha). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah mengirimkan material untuk membangun huntap Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Pembangunan huntap menghadapi permasalahan terkait akses jalan, ganti rugi dan pembebasan lahan antara masyarakat dengan pemerintah. Pembangunan dan solusi permasalahan ini masih terus dilakukan secara paralel oleh pihak terkait demi tercapainya kemaslahatan bersama. (nfd).

TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SUKABUMI

Bencana Tanah Longsor terjadi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 6 Maret 2025, pukul 20.30 WIB. Tanah Longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama di beberapa titik wilayah Kabupaten Sukabumi. Tercatat sebanyak 30 desa dalam 20 kecamatan terdampak akibat bencana tanah longsor. Kejadian tanah longsor di Kabupaten Sukabumi mengakibatkan sembilan orang meninggal dunia, enam orang mengalami luka-luka, dan menyebabkan 5.571 orang menderita dan 820 orang harus mengungsi. Kerugian material akibat bencana tanah longsor menyebabkan 434 rumah rusak berat, 555 rumah rusak sedang, 1.649 rumah rusak ringan, lima unit satuan pendidikan rusak dan tujuh unit rumah ibadah rusak. Tanah longsor juga menyebabkan tiga jembatan rusak berat dan 11 jembatan rusak sedang.

(a)

(b)

Gambar 25 (a) dan (b) Kondisi Tanah Longsor Kabupaten Sukabumi

Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam upaya percepatan penanganan pasca bencana mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/Kep.189-BPBD/2025 Tanggal 6 Maret 2025, tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi terhitung tujuh hari mulai tanggal 6 Maret sampai 12 Maret 2025 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/Kep.193-BPBD/2025 Tanggal 7 Maret 2025, tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Kabupaten Sukabumi. Sejalan dengan keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan aktivasi tiga posko darurat. Pos Utama terletak di Pendopo Kabupaten Sukabumi, pos kedua adalah Pos Lapangan yang terletak di Pelabuhan Ratu, dan pos ketiga adalah Pos Logistik yang terletak di Kantor BPBD Kabupaten

Sukabumi. Upaya percepatan penanganan terus dilakukan salah satunya adalah BPBD Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI/Polri dan pihak Kecamatan, serta unsur relawan setempat guna melakukan pendataan, evakuasi, pengamanan dan penanganan. Masa Tanggap Darurat ini difokuskan kepada pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan sarana prasarana yang rusak. Tim gabungan bersama relawan berkomitmen untuk bekerja secara maksimal dalam proses penanganan dan pertolongan korban terdampak agar prosesnya berjalan dengan cepat dan efektif.

(a)

(b)

Gambar 26 Proses Pencarian dan Pertolongan Korban Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi.

Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi

BNPB hadir dan terus melakukan pendampingan penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi. Tim melakukan koordinasi dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jawa Barat, Dandim 0622, Kapolres Kabupaten Sukabumi dan pihak-pihak Kecamatan guna melakukan percepatan penanganan pasca bencana.

Gambar 27 Upaya Pendampingan Penanganan Banjir dan Tanah Longsor dari BNPB Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Sumber: Hasil Dokumentasi Tim Pusdatinkom

Upaya percepatan dan penanganan, BNPB memberikan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 200.000.000,- dan bantuan logistik serta peralatan berupa 100 paket sembako, 50 paket hygiene kit, 100 lembar matras, 100 lembar selimut, 100 paket makanan siap saji, 100 skop, 50 garpu, 10 gerobak sorong, empat unit pompa alkon, 100 kasur lipat, 10 unit gergaji mesin, 200 pasang sepatu boots, 200 pasang sarung tangan, 50 sapu lidi, 30 pengki, 200 kaos lapangan, 200 topi lapangan, 50 parang/sabit, dan 100 cangkul.

Harapannya, dengan diberikan pendampingan, dukungan dan bantuan logistik oleh BNPB upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan percepatan penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Sukabumi dapat terselesaikan dengan cepat dan berjalan efektif.

Gambar 28 Kunjungan Wakil Presiden RI Dalam Rangka Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi. Sumber : Tim Dokumentasi Pusdatinkom

Bencana banjir dan tanah longsor Kabupaten Sukabumi mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Wakil Presiden (Wapres), didampingi Kepala BNPB meninjau lokasi jembatan putus di Kecamatan Simpanan pada Sabtu pagi (8/3). Pada kunjungan kerja ini, Kepala BNPB mendampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau Jembatan Cidadap yang putus akibat banjir. Kunjungan kerja ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap daerah terdampak bencana serta wujud nyata pemerintah hadir dalam proses penanganan dan percepatan bencana di Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan tersebut, Wapres dan Kepala BNPB memberikan bantuan simbolis kepada warga setempat. Pemerintah daerah berusaha keras dalam masa tanggap darurat dengan terus melakukan pencarian dan pertolongan bersama tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Basarnas. BNPB sebagai leading sector, terus melakukan pendampingan sebagai upaya percepatan penanganan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah pusat berkomitmen membantu Pemda dalam pelaksanaan penanggulangan pasca bencana di Kabupaten Sukabumi. Kepala BNPB mengutarakan operasi pencarian dan pertolongan terus dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas. Kepala BNPB mengatakan operasi pencarian dilakukan selama tujuh hari, namun apabila ada permintaan warga, ini dapat diperpanjang dalam beberapa hari. Kepala BNPB juga meminta Komando Distrik Militer (Kodim) untuk mengerahkan personel di lapangan. Hal ini bertujuan untuk membantu BPBD dan unsur terkait dalam pembersihan material. Pada tahap pemulihan, Kepala BNPB juga menyampaikan kepada Pemda untuk mendata jumlah keluarga yang rumahnya rusak. Selain itu, Pemda perlu mengomunikasikan dengan warga apabila akan dilakukan relokasi. Proses relokasi berupa pembangunan rumah yang akan dilakukan oleh BNPB. Pada konteks ini, Kepala BNPB menegaskan lahan harus disiapkan oleh Pemda, sedangkan rumah warga yang rusak sedang dan ringan, dana stimulan akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BNPB juga akan memastikan penanganan dan kebutuhan dasar bagi para korban.

Berdasarkan hasil perkiraan BMKG terdapat potensi cuaca ekstrem pada tanggal 10—20 Maret 2025. Kepala BNPB mengimbau agar Pemerintah Daerah Sukabumi mewaspadaai potensi cuaca ekstrem yang ada di wilayahnya. BNPB merekomendasikan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengantisipasi kejadian bencana serupa terulang di Kabupaten Sukabumi. BNPB juga mengimbau agar masyarakat dan seluruh pihak terkait terus mewaspadaai potensi cuaca ekstrem yang akan terjadi. Selain itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, juga perlu dilakukan. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir dan jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan bagi setiap orang yang melewatinya. Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk antisipasi longsor adalah menghindari berada di kawasan rawan tanah longsor pada saat hujan dan tidak melakukan penggalian di lereng-lereng kawasan tanah longsor

Penting untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi tanda-tanda lereng akan longsor, melakukan upaya segera menghindar dari lereng dan melapor ke aparat yang berwenang untuk segera melakukan pengamanan lokasi. Dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana perlu adanya sinergitas dari setiap elemen masyarakat serta pihak-pihak terkait, agar dimasa yang akan datang dampak korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalisir.

Masyarakat juga diimbau untuk memantau potensi bencana secara berkala harus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Besar harapan dengan upaya meningkatkan kewaspadaan, upaya mitigasi, pencegahan dan kerjasama antar pemerintah, BPBD, masyarakat serta instansi terkait dapat meminimalisir dampak dan korban bencana yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan duka dan luka bagi masyarakat yang terdampak bencana.(izr).

BANJIR DI KOTA PALANGKARAYA

Bencana hidrometeorologi basah tercatat melanda wilayah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 10 Maret 2025. BPBD Kota Palangka Raya melaporkan banjir melanda 16 Kelurahan di empat kecamatan. Banjir dilaporkan berasal dari luapan air Sungai Kahayan, Sungai Rungan, dan Sungai Sebangau.

Berdasarkan peta analisis sifat hujan yang dirilis oleh Stasiun Meteorologi Kelas 1 Tjilik Riwut, wilayah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan hulu sungai Kahayan memiliki sifat hujan di atas normal yang mencapai lebih dari 200%. Kabupaten Gunung Mas terletak di sebelah utara Kota Palangka Raya. Kiriman limpahan air tersebut kemudian mencapai wilayah Kota Palangka Raya dan menggenangi daerah yang berada disekitar Sungai Kahayan. Sementara itu, pada 10 Maret 2025

Gambar 29 Peta Analisis Sifat Hujan Bulan Maret 2025 Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber : BMKG

di wilayah Kota Palangka Raya sendiri sedang turun hujan. Data curah hujan dari Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut di hari itu menunjukkan angka 88 mm/hari. Angka curah hujan tersebut termasuk ke dalam kategori hujan sangat lebat.

Hingga 29 Maret 2025, BPBD Kota Palangka Raya terus bersiaga dalam memantau perkembangan ketinggian muka air di lapangan.

Adapun rincian wilayah yang terendam akibat banjir meliputi Kecamatan Pahandut di Kelurahan Tumbang Rungan, Pahandut, Tanjung Pinang, Langkai, dan Pahandut Seberang. Kemudian, Kecamatan Jekan Raya di Kelurahan Petuk Katimpun, Bukit Tunggai, dan Palangka. Selanjutnya, Kecamatan Sebangau di Kelurahan Kameloh Baru, Danau Tundai, Kalampangan, Sabangau, dan Bareng Bengkel. Lalu, Kecamatan Bukit Batu di Kelurahan Marang, Tumbang Tahai, dan Sei Gohon.

Gambar 30 Peta Wilayah Terdampak Banjir Kota Palangka Raya Tanggal 10 Maret 2025

Sumber : Pusdalops BNPB

Sementara itu dilaporkan korban terdampak akibat banjir mencapai 21.067 jiwa, empat jiwa mengungsi, dan satu orang korban meninggal dunia, serta anak berusia sembilan tahun yang tewas tenggelam akibat bermain di sekitar wilayah terdampak banjir. Korban terdampak paling banyak serta korban mengungsi seluruhnya berasal dari Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut. Korban terdampak di wilayah kelurahan tersebut tercatat sebanyak 3.672 jiwa.

Selain korban jiwa, banjir juga mengakibatkan kerugian materiel akibat terendam air. Berdasarkan data yang dihimpun Pusdalops BNPB, dilaporkan sejumlah 3.892 unit rumah warga terendam. Jumlah rumah terendam paling tinggi berasal dari Kelurahan Pahandut yaitu 859 unit rumah. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas publik juga turut terendam banjir, di antaranya adalah ruas jalan sepanjang 250 meter, 10 fasilitas pendidikan, 13 fasilitas peribadatan, dan empat fasilitas kesehatan.

Gambar 31 Personil BPBD Kota Palangka Raya Menyiagakan Perahu Untuk Membantu Evakuasi Warga.
 Sumber : BPBD Kota Palangkaraya

(a)

(b)

Gambar 32 Permukiman warga yang terdampak banjir (a) dan luapan air sungai yang mencapai permukiman (b). Sumber : BPBD Kota Palangka Raya

BPBD Kota Palangka Raya berupaya menyalurkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya kepada masyarakat terdampak banjir. Bersama-sama dengan relawan, tim dari BPBD Kota Palangka Raya menyalurkan sejumlah 1.481 paket sembako. Plt. Kalaksa BPBD Kota Palangka Raya mendampingi Ibu Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah memberikan sembako secara simbolis kepada warga di lokasi Jalan Mendawai Induk, Jalan Anoi Kelurahan Palangka dan Jalan Danau Rangas Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya. Sebanyak 305 paket sembako disalurkan untuk warga yang terdampak banjir di Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut, Kelurahan Danau Tundai Kecamatan Sebangau. Kemudian, sebanyak 1.176 Paket Sembako juga disalurkan dari Pemerintah

Kota Palangka Raya untuk warga yang terdampak banjir di Kelurahan Pahandut, kecamatan Pahandut.

Selain penyaluran bantuan, personil BPBD turut dikerahkan untuk melaksanakan Kerja bakti di wilayah drainase tersumbat ataupun wilayah yang terdapat genangan air. Personil BPBD turun untuk melakukan pembersihan drainase di Jalan Adonis Samad, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut. Drainase tersumbat disebabkan oleh pasir dan potongan-potongan kayu, dedaunan serta rerumputan yang menyebabkan drainase menjadi buntu. Pembersihan dilakukan agar aliran drainase dapat lancar kembali sehingga mempercepat penurunan tinggi muka air banjir.

Pemerintah Kota Palangka Raya juga menetapkan status siaga darurat melalui Keputusan Walikota Palangkaraya tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di wilayah Kota Palangkaraya Nomor 188.45/123/2025 yang berlaku dari 11 Maret 2025 sampai dengan 15 April 2025.

Analisis Bahaya Banjir yang terjadi di Kota Palangkaraya.

Berdasarkan peta bahaya banjir Inarisk BNPB, sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya berada di rentang bahaya sedang hingga tinggi. Bahaya banjir tinggi umumnya untuk wilayah yang berada dekat dengan sungai. Sungai Kahayan yang merupakan sungai tua yang berkelok membentuk dataran banjir (floodplain) alami yang kemudian dihuni oleh masyarakat. Dataran banjir ini yang nantinya akan terendam air jika ada kiriman air dari wilayah hulu, ataupun saat terjadi hujan intensitas tinggi dengan jangka waktu yang cukup lama melanda wilayah Kota Palangkaraya.

Gambar 33 Peta Bahaya Banjir Kota Palangka Raya. Sumber : Pusdalops BNPB

Pada tahun 2019, UN-SPIDER, lembaga respon tanggap darurat berbasis teknologi penginderaan jauh dibawah naungan PBB, sempat merilis program untuk mendeteksi banjir menggunakan citra satelit Sentinel-1. Program tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi luasan bencana banjir di Kota Palangka Raya pada 10 Maret 2025 lalu. Meskipun begitu, masih ada keterbatasan pada kemampuan satelit yang

hanya bisa mendeteksi genangan banjir yang luas karena resolusi spasial satelit hanya 20 meter. Verifikasi dan validasi lapangan tetap perlu dilakukan untuk memastikan kualitas hasil pendeteksian.

Hasil deteksi citra satelit kemudian ditampilkan dengan peta bahaya banjir Inarisk untuk kemudian dilakukan analisis. Hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa potensi genangan banjir muncul di wilayah yang memiliki indeks bahaya banjir tinggi seperti yang tertera pada Gambar 34. Wilayah genangan yang luas terdeteksi di kelurahan Tanjung Pinang, Danau Tundai, Bareng Bengel, Kameloh Baru, Petuk Katimpun, Marang, Tumbang Rungan, Pahandut Seberang, Pahandut, dan Palangka.

Gambar 34 Pertampalan Area Potensi Genangan Banjir dengan Peta Bahaya InaRISK.

Sumber : InaRISK BNPB

Secara historis, wilayah kota Palangka Raya cukup sering terkena bencana banjir. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021—2024), rata-rata banjir di Kota Palangkaraya sebanyak 24 kali setiap tahunnya. Utamanya banjir terjadi ketika memasuki musim hujan. Jumlah kejadian banjir paling tinggi terjadi di tahun 2023 dengan 31 kali kejadian bencana. Tingginya frekuensi kejadian banjir tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana, agar dampak korban dan kerusakannya di masa mendatang tidak separah yang terjadi di masa lalu. (uln).

BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Banjir dan tanah longsor terjadi di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara pada 13 Maret 2025 sekitar pukul 23.20 WIB. Kejadian bencana dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya Sungai Batang Ayumi. Kepala Bidang Peralatan BPBD Kota Padangsidimpuan mengatakan terdapat dua kecamatan yang mengalami dampak langsung, yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Sementara tiga kecamatan lainnya yang terdampak di antaranya Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Akibat bencana tersebut, dua warga dilaporkan meninggal dunia, satu warga dinyatakan hilang, dan satu warga mengalami luka-luka. Sementara itu, jumlah warga yang terdampak sebanyak 6.048 jiwa, 711 di antaranya telah mengungsi. Selain menimbulkan korban jiwa, banjir dan tanah longsor tersebut juga berdampak pada kerusakan bangunan di lokasi kejadian. Tabel 4 menjelaskan jumlah bangunan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kota Padangsidimpuan.

Tabel 3 Jumlah Bangunan Rusak Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Padangsidempuan

Tingkat Kerusakan	Jenis Bangunan		
	Rumah	Satuan Pendidikan	Rumah Ibadah
Ringan	355	1	3
Sedang	243	1	4
Berat	220	5	2

Sumber : BNPB

BPBD Kota Padangsidempuan melaporkan kondisi mutakhir pada tanggal 28 Maret 2025 atau 15 hari pasca banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa poin terkait kondisi di lokasi terdampak:

1. Ketinggian air sudah menurun drastis di 6 (enam) kecamatan;
2. Upaya pencarian kepada 1 (satu) orang hilang telah dihentikan;
3. Masyarakat didukung oleh pemerintah daerah dan relawan melakukan pembersihan material akibat banjir;
4. Melakukan koordinasi lintas sektor guna penanganan darurat yang lebih baik.

Gambar 35 Kondisi di Salah Satu Lokasi Terdampak Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Sumber : BPBD Kota Padangsidempuan

Menanggapi kejadian tersebut, Pemerintah Kota Padangsidempuan menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Padangsidempuan sesuai Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 175/KPTS/2025. Status keadaan darurat tersebut diberlakukan selama 14 hari sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan 27 Maret 2025. Selain itu, pemerintah juga melakukan Penetapan Organisasi Komando Tanggap Darurat di Kota Padangsidempuan sesuai Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 176/KPTS/2025 terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga masa berlaku Keadaan Darurat Bencana.

Selain melakukan penetapan status tanggap darurat, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Padangsidempuan, di antaranya:

1. BPBD Kota Padangsidempuan berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan evakuasi, penanganan dan pendataan;
2. Melakukan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) - Komandan tanggap darurat yaitu Wakil Walikota Padangsidempuan;
3. Melakukan perencanaan, penentuan rencana operasi dan evaluasi penanganan darurat setiap harinya di posko;
4. Melakukan pembersihan material banjir dan longsor;
5. Mendirikan posko dan tenda pengungsi bagi masyarakat yang terkena banjir dan tanah longsor;
6. Mendirikan posko utama di Kantor Walikota Padangsidempuan;
7. Pendirian posko di enam wilayah Kecamatan Kota Padangsidempuan (Kantor Camat);
8. BPBD Provinsi Sumatera Utara melakukan pendampingan SKPDB dan Keposkoan;
9. TRC PB (Penanggulangan Bencana) BPBD Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan TRC PB Kota Padangsidempuan dalam membangun dapur umum lapangan, pos kesehatan, dan penanganan darurat lainnya;
10. BPBD Provinsi Sumatera Utara dan OPD Teknis memberikan dukungan sumber daya manusia (Petugas Kebencanaan, Logistik dan Peralatan kebencanaan) untuk mendukung respon cepat di lokasi bencana;
11. Pendirian posko kesehatan;
12. Pendirian dapur umum 10 titik;
13. Pencarian korban hilang;
14. Pendataan korban banjir dan tanah longsor serta mensurvei kerusakan dan menghitung kerugian bencana (fasilitas umum, rumah dan bangunan lainnya);
15. Menerima dan mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar (makanan pokok dan pakaian);
16. Sosialisasi/menginformasikan kepada masyarakat perkiraan curah hujan yang tinggi sesuai perkiraan BMKG nasional (baik melalui media sosial, radio, siaran keliling serta melalui masjid-masjid);
17. Selama proses penanganan, beberapa unsur yang terlibat diantaranya BASARNAS Pos Madina, BPBD Provinsi Sumatera Utara, BPBD Kota Padangsidempuan, TNI dan POLRI, relawan serta masyarakat

Gambar 36 Pemerintah Kota Padangsidempuan Membuka Posko Penanganan Banjir dan Tanah Longsor
Sumber : BPBD Kota Padangsidempuan

Walikota Padangsidimpuan menerima bantuan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor melalui posko yang didirikan di halaman kantor walikota. Sejumlah bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak yang tersebar di enam kecamatan. Bantuan bersumber dari pemerintah pusat, daerah, hingga donatur. Bantuan tersebut berupa bantuan operasional atau DSP (Dana Siap Pakai), logistik, kebutuhan dasar, hingga seragam sekolah.

BNPB memberikan bantuan berupa sembako 200 paket serta tenda pengungsi sebanyak dua unit. Sementara Gubernur Sumatera Utara memberikan bantuan logistik yang disalurkan melalui BPBD Sumatera Utara. Selain itu, bantuan berupa seragam sekolah juga diberikan kepada siswa-siswi terdampak. Bantuan diberikan langsung oleh Walikota Padangsidimpuan yang didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan.

Selain dari pemerintah, bantuan juga didapatkan dari sejumlah donatur. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menyalurkan bantuan ke salah satu kelurahan terdampak yaitu Kelurahan Ujung Padang. Bantuan tersebut terdiri dari matras, pakaian layak pakai, sembako, hingga kebutuhan harian lainnya. Bantuan juga didapatkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Sumatera Utara, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPEKB) Kota Padangsidimpuan, dan beberapa donatur lainnya

Gambar 37 Warga Bersama Pihak Terkait Melakukan Pembersihan Pasca Banjir dan Tanah Longsor
Sumber : BPBD Kota Padangsidimpuan

Bencana banjir dan tanah longsor akibat hujan deras disertai luapan sungai tidak hanya terjadi baru-baru ini saja di Kota Padangsidimpuan. Hampir setiap tahun kota ini dilanda banjir. Berdasarkan data bencana BNPB, selama kurun waktu 15 tahun terakhir (2009—2024), Kota Padangsidimpuan telah mengalami bencana hidrometeorologi yaitu banjir dan tanah longsor sebanyak 22 kali. Bahkan, lima tahun terakhir, kota ini mengalami banjir setiap tahunnya. Berkaca dari kejadian tersebut, pemerintah dan warga sekitar perlu menyiapkan diri sekaligus melakukan mitigasi untuk menghindari adanya korban jiwa jika bencana tersebut kembali terjadi.

BNPB melalui modul penyusunan rencana mitigasi telah menyusun langkah mitigasi bencana. Kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana. Bentuk kegiatan mitigasi untuk bencana banjir yang bersifat struktural diantaranya pembangunan tanggul, kanal, riverside conservation area, normalisasi sungai, pembangunan pintu air, reboisasi, dan desain kompleks pemukiman 'akrab bencana'. Sementara bentuk kegiatan mitigasi banjir yang bersifat non-struktural yaitu peraturan perundangan terkait kebencanaan, kebijakan tata guna lahan, kebijakan standardisasi bangunan, pembuatan peta potensi banjir, kebijakan penerapan batas sempadan sungai, mikrozonasi daerah rawan, pelatihan hingga sosialisasi kepada masyarakat. Bencana tidak dapat dihindari, namun dampak yang ditimbulkan dari bencana dapat diminimalisir dengan berbagai upaya yang dilakukan. (fid).

BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA MANADO

Cuaca ekstrem masih melanda beberapa wilayah di Indonesia. Bencana banjir melanda Kota Manado, Sulawesi Utara (21/3), pukul 10.26 WITA. Banjir mengakibatkan beberapa kelurahan di Kecamatan Paal Dua, Wanea, Singkil, Sario, Tuminting, dan Tikala terendam air dengan ketinggian antara 20–60 cm. Akibat dari kejadian ini, satu orang meninggal dunia, 14.676 warga terdampak, dan 3.837 warga mengungsi. Saat ini, diketahui korban meninggal bernama Haikal Supriadi Montu (20) yang ditemukan hanyut di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Manado untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.

Gambar 38 Kondisi Banjir di Kecamatan Tikala, Kota Manado

Sumber : BPBD Kota Manado

Pasca dua jam kejadian banjir, sekitar pukul 12.00 WITA, Kota Manado dilanda bencana tanah longsor yang melanda enam kecamatan di Kota Manado, yakni Kecamatan Tikala, Wanea, Paal Dua, Malalayang, Sario, dan Singkil. Kondisi ini menyebabkan dua orang meninggal dunia, 316 warga terdampak, 67 warga mengungsi, dan akses jalan di beberapa titik terputus akibat tertimpa material longsor. Tercatat sebanyak 70 rumah yang dihuni sekitar 180 warga, dilaporkan mengalami kerusakan akibat tertimbun material longsor.

Gambar 39 Kondisi rumah warga yang tertimbun meterial longsor di Kecamatan Singkil, Kota Manado.
Sumber : BPBD Kota Manado.

Berdasarkan informasi Kepala BASARNAS Kota Manado, George Mercy Randang mengonfirmasi bahwa dua korban meninggal akibat tanah longsor bernama Arnold Mamahit (76) yang ditemukan di Kelurahan Malendeng Lk 6 Kecamatan Paal Dua dan Novianti Kipido (11) dari Kelurahan Bailang Lk 4 Kecamatan Wanea. Kedua korban ditemukan tertimbun material longsor di rumahnya pada Sabtu (22/3). Korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Manado.

Gambar 40 Proses evakuasi korban tanah longsor di Kota Manado.
Sumber : BPBD Kota Manado.

Berdasarkan laporan dari Pusdalops BPBD Kota Manado, banjir dan tanah longsor disebabkan karena adanya intensitas hujan yang tinggi selama kurang lebih tiga hari terakhir yang puncaknya terjadi pada hari Jumat (21/3). Hujan turun sangat deras selama kurang lebih tujuh jam. Hal ini menyebabkan air dari drainase permukiman dan aliran sungai dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano meluap ke jalan dan rumah-rumah warga. Bahkan ketinggian air di Kecamatan Tikala dan Singkil mencapai pinggul orang dewasa sekitar 150 cm. Tingginya luapan air mengakibatkan satu pohon tumbang di Kelurahan Sario. Puskesmas Mahakam terendam, dan beberapa akses jalan terendam air sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang melintas. Adapun lokasi pengungsian tersebar pada 55 titik, di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Paal Dua sebanyak 1880 jiwa, Kecamatan Tikala sebanyak 269 jiwa, dan Kecamatan Singkil sebanyak 302 jiwa. Sejumlah warga mengungsi secara mandiri di rumah kerabat atau sanak saudara yang jaraknya lebih dekat.

(a)

(b)

Gambar 41 (a) dan (b) Kondisi Tanah Longsor dan Banjir di Kota Manado

Sumber : BPBD Kota Manado

Tim gabungan dari unsur BPBD Provinsi Sulawesi Utara dan BPBD Kota Manado langsung melakukan koordinasi bersama dengan instansi terkait dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kota Manado. Tim gabungan dibantu BASARNAS, Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Manado, Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Manado, Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado, staf kelurahan, dan aparat RT/RW setempat melakukan evakuasi korban serta pembersihan area jalan yang tertimbun lumpur dari genangan banjir dan material longsor. Alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan lumpur akibat genangan air di jalan. Kepala BASARNAS Kota Manado menambahkan proses evakuasi korban dan pembersihan area jalan cukup sulit dilakukan, karena rumah korban tertutup material longsor serta lokasi bencana yang masih diguyur hujan.

BPBD Provinsi Sulawesi Utara dan BPBD Kota Manado melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak bencana mulai dari jumlah korban, kerusakan rumah, serta kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh pengungsi. Berdasarkan hasil pendataan, bantuan yang dibutuhkan oleh pengungsi berupa paket makanan siap saji, family kit, selimut, tikar, dan pakaian. Sebagai langkah awal penanganan pengungsi, Pemerintah Kota Manado mendirikan dapur umum yang berlokasi di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Sola Gratia

Kecamatan Tikala yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Manado. Selain itu, posko kesehatan juga disiagakan untuk memantau kondisi kesehatan para pengungsi. Adapun pos kesehatan dipusatkan di empat titik, di antaranya Pos Pengungsi Paal Dua Lingkungan IV, Masjid Ar Rahmah Banjer, Masjid Hidayatullah Molas, dan Masjid Darul Arqam Ternate Tanjung.

(a)

(b)

Gambar 42 Proses pembersihan jalan akibat bencana banjir dan tanah longsor menggunakan bantuan alat berat. Sumber : BPBD Kota Manado.

Sekretaris Daerah Kota Manado didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara menyerahkan bantuan siaga bencana dari BPBD Provinsi di beberapa lokasi pengungsian. Adapun lokasi pengungsian yang dikunjungi, yaitu Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Elshadai Paal Empat, Gereja Tabor Tokala Baru, Kelurahan Olong Songke, GMIM Maranatha Karama Lingkungan 3, dan Masjid Miftahul Jannah Ketang baru.

Gambar 43 Penyerahan bantuan dari BPBD Kota Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada masyarakat terdampak bencana di Kota Manado. Sumber : BPBD Kota Manado.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata bagi masyarakat yang mengalami musibah, PT Bank Negara Indonesia (BNI) juga memberikan bantuan tanggap darurat kepada warga yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kota Manado. Bantuan yang diberikan berupa sembako, makanan kaleng dan popok bayi yang diserahkan langsung oleh Pimpinan BNI Kantor Wilayah 11 Suluttenggomalut Lodewyck Z.S. Pattihuan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay, di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Minggu (23/3).

Gambar 44 Penyaluran Bantuan Tanggap Darurat Bencana oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Provinsi Sulawesi Utara. Sumber : BPBD Kota Manado

Pemerintah Kota Manado telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Status Siaga Darurat Bencana Banjir Pesisir dan Bencana Hidrometeorologi terhitung mulai tanggal 14 Februari sampai 14 Mei 2025. Untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan dampak kejadian bencana, BPBD Kota Manado, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, dan BMKG terus melakukan pemantauan peringatan dini cuaca melalui satelit Himawari dan informasi gempa secara terkini melalui situs resmi BMKG. Selain itu, dilakukan pemantauan debit air Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui rekaman CCTV Command Center Manado dan sistem peringatan dini BPBD setempat. Pemerintah Kota Manado serta instansi terkait juga melibatkan masyarakat dalam proses mengumpulkan informasi melalui alat komunikasi radio, dan media sosial agar penanggulangan bencana dapat ditangani dengan cepat (dit).

BANJIR DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR

Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Berau pada Senin, 25 Maret 2025 tepatnya pukul 21.30 WITA, menyebabkan Sungai Kelay meluap dengan arus deras dan menimbulkan banjir. Laporan Pusdalops BNPB mencatat terdapat dua kecamatan dan tujuh kampung terdampak secara signifikan (Tabel 5).

Korban terdampak sejumlah 10.374 jiwa dengan 47 jiwa mengungsi. Jumlah korban meninggal P. 38

Tabel 5 Daftar Wilayah Yang Terdampak Banjir di Kabupaten Berau

Kecamatan	Kampung
Sambaliung	Tumbit Dayak
	Long Lanuk
	Inaran
	Bena Baru
	Pegat Bukur
Teluk Bayur	Tumbit Melayu
	Labanan Makarti

Sumber : Pusdalops BNPB

dunia terdapat tiga orang lansia dan satu orang hilang. BPBD Kalimantan Timur mengonfirmasi bahwa kematian bukan disebabkan banjir secara langsung, melainkan dikarenakan kondisi fisik yang memburuk saat evakuasi. Sedangkan untuk kerugian yang ditimbulkan sejumlah 3.500 unit rumah terendam.

Selain rumah terendam, kerugian lain yang dialami adalah hilangnya sumber pangan warga. Banjir merendam hasil panen warga yang disimpan di pondokan lumbung pagi yang juga rusak karena tergenang banjir. Warga yang beternak hewan juga mengalami kerugian, sebagian besar warga beternak ayam, bebek, sapi, dan babi.

Berdasarkan peta pada Gambar 45, dapat dilihat bahwa daerah terdampak banjir masuk ke dalam wilayah bahaya banjir dengan indeks bahaya ada pada rentang sedang hingga tinggi. Pada peta yang menampilkan risiko banjir juga dapat terlihat bahwa titik bahaya juga merupakan titik risiko banjir, sehingga ada kemungkinan di lokasi yang sama dapat kembali terjadi banjir jika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu yang lama.

Gambar 45 Peta kejadian banjir (25/3) disertai dengan layer bahaya dan risiko banjir Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sumber : InaRISK BNPB.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Berau, Novianto Hidayat mengatakan meluapnya Sungai Kelay lantaran berkurangnya area resapan karena alih fungsi untuk bukaan lahan perkebunan atau pertambangan. Faktor lain terjadinya banjir selain karena intensitas hujan sedang/tinggi di hulu, juga karena air permukaan laut di hilir sedang naik.

Gambar 46 Daerah terdampak banjir di Kabupaten Berau (25/3). Sumber ; BPBD Kabupaten Berau.

Ade Heryadi, selaku Kepala BMKG Berau mengatakan hujan lebat ikut memicu banjir di Sungai Kelay. Kondisi atmosfer cukup labil di Berau selama seminggu terakhir dan pertumbuhan awan sedang kontinu turun, terutama pada dini hari dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Curah hujan di hulu Sungai Kelay tercatat sampai 95 mm pada 24 Maret 2025.

Banjir parah terjadi karena beberapa faktor di antaranya anomali suhu muka laut Sulawesi masih positif. Selain itu adanya low frequency secara spasial diperkirakan aktif di wilayah Berau pada 27 hingga 29 Maret 2025. Terdapat pula belokan angin di Kalimantan Utara yang memanjang hingga Kalimantan Barat.

Selain di daerah Sungai Kelay, hujan lebat juga terjadi di Sungai Segah. Pada Kampung Merasa, Kecamatan Kelay terdapat alat pendeteksi pergerakan permukaan air sungai sehingga langkah-langkah mitigasi dapat secepatnya dilakukan. Berbeda dengan daerah Sungai Segah, peralatan pendeteksi ketinggian air sungai masih belum ada, sehingga perlu ada kewaspadaan bersama.

Gambar 47 Kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (25/3). Sumber : BPBD Kabupaten Berau.

BMKG Berau mencatat hujan sedang sampai hujan petir diperkirakan masih terjadi sampai 2 April 2025, terutama di Kecamatan Kelay dan Segah, sehingga bencana tanah longsor juga harus diwaspadai akan terjadi. Bagi warga yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pesisir dan daerah aliran sungai agar selalu waspada dikarenakan terdapat potensi terjadinya banjir rob pada saat pasang.

Tercatat pada tanggal 30 Maret 2025 pukul 07.00–10.00 WITA dan pukul 20.00–22.00 permukaan air mencapai ketinggian 2.4–2.7 meter. Sedangkan pada 31 Maret

2025 pasang tertinggi pada pukul 07.00–10.00 WITA mencapai 2.1–2.9 meter dan pada pukul 20.00–23.00 WITA mencapai 2.2–2.6 meter.

Meski banjir sudah mulai surut, BNPB selalu mengimbau agar masyarakat selalu waspada terhadap potensi bencana dan memastikan agar menyiapkan tas siaga bencana berisi perlengkapan darurat. Ikuti arahan petugas dan selalu pantau informasi cuaca serta situasi terkini.

Upaya Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Berau beserta tim relawan dan instansi terkait segera melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Pendataan dan pemberian bantuan logistik serta perawatan medis juga dengan cepat dilakukan guna memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan.

Gambar 48 BPBD Kabupaten Berau beserta TNI, Polri dan tim relawan ikut serta dalam evakuasi serta memberikan bantuan kepada korban terdampak. Sumber : BPBD Kabupaten Berau.

Koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemulihan fasilitas umum dan pemukiman warga yang terdampak banjir terus dilakukan dan menjadi perhatian utama. Upaya lain yang dilakukan BPBD Kabupaten Berau dengan beberapa instansi terkait adalah mendirikan Posko Siaga Bencana.

Gambar 49 Pendirian Posko Siaga Bencana di Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Berau
Sumber : BPBD Kabupaten Berau

Dalam mengatasi bencana ini, Pemerintah Kabupaten Berau telah membentuk tim reaksi cepat multisektor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 588 Tahun 2024 sebagai bentuk kolaborasi terpadu penanggulangan bencana. Saat ini TRC pun telah bergerak ke sejumlah kampung yang mengalami musibah banjir.

Tim BPBD telah melakukan evakuasi, pemberian bantuan logistik, pendirian posko, pendirian dapur umum, dan mendistribusikan air bersih. Bantuan yang telah dikirimkan berupa tenda, perahu karet, bahan pangan, pakaian, dan selimut. Pihaknya mengimbau kepada warga agar tetap berhati-hati, tidak terbawa arus dan terus waspada terhadap munculnya potensi penyakit kulit serta diare. (rth).

PREDIKSI BENCANA APRIL 2025

Berdasarkan data historis yang dicatat BNPB, jumlah kejadian bencana pada bulan April selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahun, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 sejumlah 369 kejadian dan terendah pada tahun 2024 dengan 208 kejadian bencana. Banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor merupakan bencana yang paling dominan terjadi selama bulan April. Maka, perlu diwaspadai terjadinya tiga kejadian hidrometeorologi tersebut pada bulan April 2025 mendatang.

BMKG telah merilis prediksi curah hujan di Indonesia untuk bulan April 2025. Berdasarkan Peta Prakiraan Curah Hujan, kondisi hujan di berbagai wilayah Indonesia diprediksi bervariasi, mulai dari kategori rendah hingga sangat tinggi.

Berdasarkan Gambar 51 wilayah Indonesia pada periode dasarian I di Bulan April 2025 mengalami curah hujan dengan kategori rendah hingga tinggi. Distribusi wilayah untuk dasarian I antara lain:

1. Sumatera

Pada bagian barat Sumatera terutama Aceh dan Sumatera Barat memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Pada sebagian Riau dan Sumatera Selatan menunjukkan curah hujan rendah hingga menengah.

2. Jawa

Sebagian besar Jawa bagian selatan terutama Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan curah hujan menengah hingga tinggi. Sedangkan untuk Jawa bagian utara cenderung lebih kering (rendah).

3. Kalimantan

Kalimantan Tengah dan Selatan menunjukkan curah hujan tinggi, sedangkan bagian utara (Kalimantan Utara) lebih ke arah rendah hingga menengah.

4. Sulawesi

Curah hujan menengah dominan di Sulawesi bagian tengah dan tenggara. Untuk Sulawesi Selatan dan Utara memiliki area dengan curah hujan tinggi dan rendah secara bervariasi.

5. Nusa Tenggara

Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagian besar mengalami curah hujan sangat rendah hingga rendah, menandakan musim kemarau mulai masuk.

6. Papua

Bagian selatan dan tengah Papua menunjukkan curah hujan sangat tinggi, yang merupakan karakteristik wilayah tropis lembab.

Gambar 50 Grafik Jumlah Kejadian Bencana Bulan April di Indonesia. Sumber : Data Primer

7. Maluku

Maluku Utara menunjukkan curah hujan menengah, sementara Maluku bagian selatan memiliki variasi dari rendah hingga tinggi..

(a)

(b)

Gambar 51 (a) dan (b) Peta Prakiraan Curah Hujan dan Peta Prediksi Daerah Potensi Banjir Indonesia Dasarian I April 2025. Sumber : BMKG

Berdasarkan Gambar 52. Peta Prediksi Daerah Potensi Banjir Dasarian II di Bulan April 2025, maka daerah yang berpotensi mengalami banjir diantaranya:

1. Sumatera
Sebagian besar wilayah barat Sumatera (Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan) menunjukkan banjir menengah hingga tinggi. Riau, Jambi, dan Bengkulu juga terdapat titik-titik banjir menengah.
2. Jawa
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur menunjukkan banjir menengah hingga tinggi, terutama di dataran rendah dan daerah aliran sungai besar. Wilayah utara cenderung lebih aman, dengan potensi banjir rendah.
3. Kalimantan
Kalimantan Tengah dan Selatan memiliki area signifikan dengan potensi banjir tinggi. Bagian tengah dan timur menunjukkan potensi banjir menengah.
4. Sulawesi
Tersebar potensi banjir rendah hingga menengah, terutama di Sulawesi Selatan dan Tengah. Tidak terlalu banyak wilayah dengan potensi banjir tinggi.
5. Nusa Tenggara
Hampir seluruh wilayah NTT dan NTB menunjukkan tidak ada potensi banjir.
6. Papua dan Maluku
Papua bagian selatan dan tengah memiliki potensi banjir menengah hingga tinggi. Maluku relatif aman, sebagian hanya menunjukkan potensi rendah.

(a)

(b)

Gambar 52 (a) dan (b) Peta Prakiraan Curah Hujan dan Peta Prediksi Daerah Potensi Banjir Indonesia Dasarian II April 2025. Sumber : BMKG

Maka, pada dasarian I bulan April 2025 wilayah dengan curah hujan tinggi dan potensi banjir tinggi sehingga perlu kewaspadaan lebih adalah Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Sumatera Barat, dan Pantura Jawa Tengah bagian barat.

Pada dasarian II bulan April 2025, tren curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia mengalami beberapa perubahan. Semakin banyak wilayah yang masuk kategori curah hujan rendah (0—20 mm), terutama di Jawa bagian timur, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa wilayah yang mengalami curah hujan tinggi pada dasarian I, pada dasarian II mengalami curah hujan dengan kategori menengah (20—100 mm). Hanya tersisa beberapa wilayah Papua dan sedikit area Maluku serta selatan Jawa yang mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (>150 mm).

Wilayah prioritas untuk kewaspadaan banjir pada dasarian II April 2025 antara lain Sumatera bagian barat dan utara, Kalimantan bagian tengah dan selatan, serta Papua bagian selatan. Untuk wilayah lain seperti Jawa Timur, Bali, dan NTT mulai aman dari banjir dan cenderung menuju musim kemarau.

Pada dasarian III, Gambar 53 menunjukkan tanda-tanda awal pergeseran musim, dari musim penghujan ke musim kemarau. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mulai mengering yang merupakan indikasi menuju musim kemarau, hal ini perlu diperhatikan karena berisiko terjadi kekeringan. Namun, masih ada beberapa wilayah yang potensial terjadi banjir atau tanah longsor yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah-Selatan, dan Papua Selatan. (ain).

(a)

(b)

Gambar 53 (a) dan (b) Peta Prakiraan Curah Hujan dan Peta Prediksi Daerah Potensi Banjir Indonesia Dasarian III April 2025. Sumber : BMKG

Hingga akhir bulan 31 Maret 2025 telah terjadi 261 kejadian bencana dan menyebabkan 40 orang meninggal dan tujuh hilang serta 82 orang terluka. Secara kumulatif, lebih dari 871.059 orang menderita & mengungsi. Bencana juga telah mengakibatkan 6.503 unit rumah mengalami kerusakan. Kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi, banjir merupakan bencana dengan frekuensi paling banyak. Sedangkan korban meninggal diakibatkan oleh tanah longsor, banjir dan cuaca ekstrem.

Peta Kejadian Bencana Bulan Maret 2025

Rekapitulasi Kejadian Bencana
Periode: 1 Januari - 31 Maret 2025

813 kejadian bencana
Menderita dan Mengungsi
2.636.394 jiwa
Meninggal dan hilang
161 jiwa

12.809 Rumah rusak
1.787 unit Rumah Rusak Berat
2.520 unit Rumah Rusak Sedang
8.502 unit Rumah Rusak Ringan

Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Bulan Maret Periode Tahun 2015 - 2025

Perbandingan Kejadian Bencana Berifat Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem dan Kebakaran Hutan Bulan Januari 2024 dan 2025

Data Kejadian Bencana Bulan Maret 2025

Persentase Kerusakan Rumah

44 %

diakibatkan oleh **Tanah Longsor**

Persentase Korban yang Menderita & Mengungsi

97.97 %

diakibatkan oleh **Banjir**

Jumlah Korban Meninggal & Hilang

47 jiwa

Jumlah Kejadian Bencana

261 kejadian